

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak akhir era Perang Dingin pada tahun 1991, hard diplomasi kehilangan entitasnya. Ini artinya masalah ekonomi, hak asasi manusia, lingkungan, sosial-budaya mulai menjadi bahan prioritas dibandingkan dengan periode sebelumnya yang lebih berfokus pada keamanan dan militer saja. Gerakan ini secara signifikan memberi dampak pada tatanan hubungan internasional yang semula pada konteks diplomasi negara - aktor negara (IGO) menjadi sub-state - aktor sub-state (INGO) yang sekarang disebut dengan 'paradiplomacy', yang merupakan tren baru diplomasi. Istilah ini dipopulerkan oleh sarjana dari Basque, Payanotis Soldatos di tahun 1980-an sebagai kombinasi istilah '*parrarel* diplomasi' ke 'paradiplomacy' yang mengacu pada makna 'kebijakan luar negeri pemerintah pemerintah daerah' .¹

Walaupun paradiplomacy memiliki karakteristik baru, intinya masih sama, yaitu suatu proses politik untuk mempertahankan kebijakan luar negeri dalam pemerintahan tertentu dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah lainnya.² Diplomasi tidak hanya menyangkut hal politik, tetapi juga sebagai kekuatan multi-dimensi yang digunakan pada perputaran dalam hubungan antar bangsa.³ Dapat dikatakan bahwa hubungan internasional baru-baru ini ditandai dengan kegiatan diplomatik yang sangat kompleks. Seiring dengan meningkatnya isu-isu kontemporer, diplomasi menjadi alat utama untuk memecahkan gangguan, asimetri, miskomunikasi yang terjadi antara negara-negara di seluruh dunia.

¹ Mukti, Takdir Ali, '*Paradiplomacy*'. *Kerjasama Luar Negeri Pemda di Indonesia* The Phinisi Press, Yogyakarta, 2013, PT. 2.

² Suryokusuno, Sumarno, '*Praktik Diplomasi*', STIH IBLAM, Jakarta, 2004. Page. 2

³ *Ibid.* Halaman. 3

Era globalisasi menjadi alasan utama dari negara-negara untuk bekerja sama dengan satu sama lain. Hal ini didasarkan pada sifat negara yang perlu untuk membantu negara yang lain (saling bergantung), dalam hal sumber daya alam, teknologi, energi, informasi bahkan perdagangan. Fenomena globalisasi ini memberikan manfaat terhadap masing-masing negara dan masyarakat di seluruh dunia. Individu dapat berinteraksi dengan individu lain di negara tertentu tanpa batas buatan seperti, serta organisasi atau perusahaan multinasional. Hal ini seolah-olah kita telah tinggal di satu tanah horisontal, seperti kata Thomas L. Friedman dijelaskan bahwa 'dunia ini datar'.⁴ Globalisasi membawa sistem interaksi dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk negara-negara menjadi lebih mendalami hubungan satu dengan yang lainnya. Kehadiran sub-pemerintah (pemerintah daerah) adalah salah satu aktor baru di arena internasional dalam era globalisasi ini. Hal ini membuat banyaknya perjanjian internasional yang dilakukan oleh sub-pemerintah di setiap negara di mana satu sama lain saling bekerja sama. Mulai dari gerakan tersebut, jaringan paradiplomacy di belahan dunia mulai muncul dan berkembang cukup pesat terutama di negara berkembang. Paradiplomacy dapat dikategorikan sebagai sister city atau sister province.

1. Pengertian Sister City

Sister city dapat didefinisikan ketika sebuah komunitas dari berbagai ukuran memutuskan untuk join dengan masyarakat di negara lain untuk mempelajari lebih lanjut tentang satu sama lain, dan untuk mengembangkan pertukaran pembelajaran, selanjutnya dua aktor dari sister city mengusulkan afiliasi resmi yang mengarah ke perjanjian sebagai '*Sister City*'. Hubungan tersebut menjadi resmi dengan menandatangani perjanjian formal dengan dua

⁴ Mukti, Takdir Ali, *Ibid*, Halaman. 8

yurisdiksi resmi.⁵ Sister city memiliki kebutuhan intrinsik untuk melibatkan semua bagian dari masyarakat, terutama pemerintah daerah, relawan dan sektor swasta, untuk membentuk layak, kemitraan produktif. Lebih dari program internasional lainnya, hubungan sister city melibatkan keragaman seluas mungkin pertukaran dan proyek. Pada dasarnya, apa pun yang terjadi di dalam masyarakat telah menjadi subyek dari proyek sister city. Ini meliputi berbagai bidang seperti seperti ekonomi, pendidikan, pengembangan usaha, environ ment, seni, perawatan kesehatan dan banyak lagi.

Saat ini, dengan popularitas kemitraan sister city ini, dapat diprediksi bahwa ribuan kota di seluruh dunia bekerja sama satu sama lain, terutama negara-negara berkembang. Asumsi ini dapat dibuktikan pada South East Asia yang dikategorikan sebagai daerah berkembang, tetapi jumlah kota yang menerapkan program sister city meningkat secara semakin banyak di Indonesia hingga tahun 2014, ada 14 kota di Indonesia yang dibuat sehubungan dengan kota-kota asing, yaitu.; Banda Aceh, Medan, Jakarta, Bandung, Bogor, Bau - Bau, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Manado, Kupang, Ambon dan Kabupaten Kepulauan Aru. Dari contoh-contoh ini, dapat diprediksi bahwa selanjutnya bisa lebih banyak kota lainnya melakukan hal yang sama, sehingga kota-kota di Indonesia yang cukup produktif membuat hubungan dengan kota-kota asing. Alasan inilah banyak kota menerapkan Program sister city . Salah satu kota yang menjadi perhatian utama tesis penulis adalah Yogyakarta (Indonesia) yang memiliki hubungan dengan Kyoto (Jepang).

Sebelum menjelajahi lebih jauh, diketahui bahwa Indonesia dan Jepang memiliki hubungan yang baik, terutama pada sektor pembangunan. Hal ini karena lokasi geografis kedua negara dan keinginan yang sama untuk membangun perdamaian, stabilisasi dan kesejahteraan,

⁵ <http://nhsistercities.org/page/what-are-sister-cities> diakses 08 desember 2016

juga perjuangan untuk kedua kota untuk meningkatkan kerja sama tentang masalah lingkungan (termasuk bencana alam), ancaman kejahatan dan kesehatan. Karena kerja sama yang ketat ini, mendorong DIY sebagai sub-negara bagian Indonesia untuk membuat hubungan dengan sub-negara di Jepang.

2. Kerja sama Sister City DIY dengan Prefektur Kyoto

Visi kedua kota melakukan kerja sama adalah dengan semangat persahabatan untuk memajukan hubungan pariwisata dan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Jepang. Keuntungan dari sister city antara DIY dengan Prefektur Kyoto menciptakan hubungan internasional adalah pertukaran informasi, gagasan, pengetahuan dan kebudayaan. Hal ini juga memperbesar wawasan masyarakat dan aparat pemerintahan DIY.

Sebenarnya, program sister city antara DIY dengan Prefektur Kyoto diperlukan untuk membandingkan banyak aspek. Kerja sama ini dapat digunakan untuk melihat kemajuan kota-kota lain dan diadopsi caranya. Kerja sama ini telah dilakukan dari tahun 1985 namun masih berjalan di sektor yang menjadi utama kerja sama prioritas ditandatangani seperti seni dan budaya, pariwisata, pendidikan, pembangunan, lingkungan, transportasi, industri, investasi, transportasi, dan pertanian.

Kyoto, adalah sebuah Prefektur di negara Jepang yang terletak hampir di tengah-tengah pulau Honshu. Perekonomian prefektur Kyoto sangat tergantung pada sektor pariwisata. Daerah utara Kyoto terdapat usaha perikanan yang maju, sedangkan di tengah-tengahnya terdapat usaha perkebunan dan perhutanan. Nintendo, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang hiburan juga berbasis di Kyoto.⁶

⁶ Kyoto Prefecture pada www.pref.kyoto.jp/index_e.html diakses 07 september 2017

Gubernur Kyoto pada waktu itu, Yukio Hayashida yang telah banyak mengetahui kondisi DIY karena sewaktu perang dunia II ditugaskan di DIY, memiliki keinginan untuk menjalin kerja sama dengan Provinsi DIY. Keinginan tersebut disambut baik oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono IX karena adanya hubungan pribadi antara kedua belah pihak.

Hubungan kerja sama tersebut mulai resmi dilakukan sejak 16 Juli 1985 bersamaan dengan ditandatangani persetujuan hubungan kerja sama persahabatan antara kedua pemerintah provinsi oleh Sri Paku Alam VIII selaku wakil Gubernur DIY dan Yukio Hayashida selaku Gubernur prefektur Kyoto. Latar belakang utama kerja sama tersebut antara lain yaitu kedua provinsi adalah tujuan wisata baik internasional maupun domestik, lalu kedua ibukota provinsi tersebut pernah dijadikan ibukota negara dan memiliki nilai-nilai perjuangan, serta kedua provinsi memiliki keindahan alam yang dapat diandalkan bagi pengembangan pariwisata dan pendidikan. Adapun bidang-bidang yang disepakati Kesenian dan Kebudayaan, Pendidikan dan Tehnologi Ilmu Pengetahuan, Peningkatan Pariwisata, Industri, Lain-lain.

Dengan dibangunnya kerja sama persahabatan bertajuk Sister Province tersebut, maka diharapkan kedua belah pihak dapat saling membantu dalam berbagai sektor. Dan juga memberi perubahan dan manfaat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga tolak ukur kesuksesan dari kerja sama ini dapat terlihat perkembangannya.

3. Kendala yang Dihadapi

Pada perjalanannya, kerja sama kedua belah pihak ini masih ditemukan kendala, antara lain belum optimalnya kinerja komite bersama yang telah terbentuk, masyarakat yang belum terlalu aktif dikarenakan masih banyaknya masyarakat yogyakarta yang belum mengetahui, merasakan, dan sadar hasil dari kerjasama sister city, pemanfaatan pengetahuan dan keterampilan petugas yang pernah mengikuti pelatihan di Kyoto tidak maksimal, pada bidang

pendidikan kerja sama dirasa belum konkrit dan terasa lepas tangan dalam penanggung jawabannya, anggaran juga merupakan kendala yang paling penting dikarenakan tidak hanya dengan Prefektur Kyoto kerja sama ini dilakukan, kerja sama ini baru intens setelah mendekati perayaan 5 tahunan, kerja sama ini juga dianggap sebagai kerja sama *ceremony*, serta belum ada mekanisme pelaporan terhadap penyelenggaraan kerja sama, sehingga tidak bisa diketahui perkembangan kerja sama ini. Padahal berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan hubungan kedua provinsi ini. Oleh karenanya, menurut penulis posisi DIY karena lebih diuntungkan karena lebih banyak dibantu daripada membantu.

Pada selanjutnya penelitian ini akan menganalisis tentang penerapan seperti apa yang membuat kedua kota dapat menjaga kerja sama, dan kemudian penerapan hasil / keuntungan dari kerjasama tersebut, apakah itu memberi manfaat secara tidak langsung. Dan masalah ini sangat penting, untuk diteliti lebih lanjut, kita tahu tidak hanya tujuan dari kedua kerja sama, tetapi juga efektivitas dalam tahun ke 30 hubungan. Kesimpulannya, hubungan DIY dengan Prefektur Kyoto di masa depan kualitas kerja sama kedua belah pihak dapat berjalan lebih baik dari yang sebelumnya.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pada pemaparan yang terdapat pada latar belakang, kami tertarik untuk meneliti tentang :

Bagaimana implementasi dan evaluasi (*cost and benefit*) kerja sama sister city antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Prefektur Kyoto?

C. Tujuan Penelitian

a. Tesis ini bertujuan untuk membuka wawasan mengenai suatu kerja sama sister city antara DIY dengan Prefektur Kyoto, dengan mengulas latar belakang perkembangannya serta berbagai manfaat yang dapat diperoleh melalui bentuk kerja sama sister city. Fokus studi tesis ini ialah membahas tentang bagaimana proses implementasi kerjasama yang diciptakan oleh kedua kota tersebut dalam kerjasama Sister City, serta meneliti bagaimana kelanjutan kerjasama yang kedua kota tersebut kedepannya.

b. Dapat menjawab suatu permasalahan yang ada dan dapat di uji hasil hipotesa yang ditulis oleh penulis.

c. Dapat mengaplikasikan teori pada suatu masalah yang ada sehingga dapat mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena yang ada.

b. Menjadi tahapan untuk mendapat gelar S-2 pada program magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan peneliti untuk mencari informasi yang valid dalam topik dan permasalahan yang akan diteliti. Perolehan informasi didapat dari penelitian yang sudah ada, buku-buku, jurnal, thesis, disertasi, peraturan perundangan dan dari segala sumber baik dari yang tercetak maupun elektronik.

Tinjauan pustaka juga merupakan rangkaian di dalam penelitian. Teori dan konsep menjadi hal yang dasar pada masalah dan bidang yang diteliti dengan melakukan kepustakaan.

suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Kemudian seorang peneliti bisa mengambil informasi pada penelitian sejenis yang berkaitan dengan hal yang diteliti.

Table D.1 Tinjauan Pustaka

No	Nama	Judul	Jawaban Riset Question
1	Takdir Ali Mukti	Paradiplomacy kerjasama luar negeri oleh Pemda di Indonesia	Di implementasikan dengan membangun 3 pikiran utama pertama, membangun konstruksi hubungan dan kerja sama luar negeri secara umum sekaligus meletakkan posisi pemda selaku aktor hubungan transnasional dalam skema itu, kedua membangun konstruksi hukum dalam kerja sama luar negeri, dan ketiga membangun konstruksi tata kelola dan koordinasi antara pusat dan daerah dalam urusan kerja sama luar negeri. Contoh kasusnya seperti kerja sama sister city pemprov DIY dengan Prefektur Kyoto.
2	Jawahir Thontowi (UII)	Kewenangan daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri studi kasus pada Propinsi Jawa Barat dan DIY	Pemda bisa melaksanakan kerja sama internasional tidak bisa dilihat sebagai layaknya subjek hukum internasional yang lain seperti negara. Akan tetapi lebih kepada perpanjangan akan kekuasaan suatu negara bermula dari pemerintah pusat yang dijalankan oleh pemda.
3	Agustinu Supriyanto dan Andi ATT (UGM)	Pengembangan potensi propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui kerja sama sister province	Di implementasikan dengan empat hal yaitu <i>contact person</i> professional, posisi masing-masing pihak konsisten, kelembagaan yang di bentuk dan diatur secara proposional, dan dana mencukupi akan mengakibatkan kerja sama ini berjalan lancar jika sebaliknya akan mengakibatkan kerja sama tersebut tidak dapat dijalankan.
4	Khoero dara fazra (UMY)	Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional (Studi Kasus: Proses Kerja sama Sister City Kabupaten Bogor dengan Nanning (RRT) pada tahun 2008-2015)	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penataan kerjasama adalah dengan empat tahapan Tahap pertama adalah penjajagan atau perkenalan, Tahap yang kedua, yaitu pembahasan draft MoU, Tahap yang ketiga, yaitu penandatanganan MoU, Tahap keempat, pelaksanaan kegiatan.
5	Albert	faktor-faktor yang	Hasil penelitian menunjukkan bagaimana

	(Universitas Katolik Soegijapran atau Semarang)	menunjang keberhasilan dari Sister City Semarang - Brisbane	keberhasilan kerjasama sister city berdasarkan; (1) faktor kompetensi SDM, (2) faktor funding sebaiknya ditanggung oleh kedua belah pihak dan dikelola oleh lembaga keuangan terkait, (3) faktor infrastruktur yang penting adalah komunikasi dan jalan raya, (4) faktor kelembagaan pemerintah, (5) faktor masyarakat harus aktif dalam sister city dan (6) faktor negara mitra.
--	---	---	---

Dalam buku yang ditulis oleh Takdir Ali Mukti dengan judul buku “ *Paradiplomacy kerjasama luar negeri oleh Pemda di Indonesia*” buku ini membahas tentang hubungan transnasional yang mewarnai sistem interaksi masyarakat dunia pasca rezim Westphalia memiliki karakter yang lebih partisipatif bagi semua aktor internasional, baik pada tingkat negara maupun lokal, institusional maupun individual. Hubungan transnasional tidak serta merta menghapuskan sendi utama kedaulatan suatu negara, namun melahirkan sebuah tuntutan untuk pengaturan lebih lanjut tentang komitmen negara untuk melakukan share kedaulatan dalam batas-batas konstitusinya. Kekuatan buku ini terletak pada upayanya untuk membangun 3 pikiran utama pertama, membangun konstruksi hubungan dan kerja sama luar negeri secara umum sekaligus meletakkan posisi pemda selaku aktor hubungan transnasional dalam skema itu, kedua membangun konstruksi hukum dalam kerja sama luar negeri, dan ketiga membangun konstruksi tata kelola dan koordinasi antara pusat dan daerah dalam urusan kerja sama luar negeri. Contoh kasusnya seperti kerja sama sister city pemprov DIY dengan Prefektur Kyoto, pada kasus tersebut buku ini menjelaskan implementasi dari kerja sama tersebut dapat dilihat dari latar belakang hubungan kerja sama, kegiatan yang telah terlaksana hal-hal yang disepakati serta manfaat kerja sama yang telah dilakukan sehingga.

Selanjutnya penelitian dari Jawahir Thontowi UII berjudul ‘Kewenangan daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri studi kasus pada Propinsi Jawa Barat dan DIY’. Dari hasilnya pelaksanaan kerja sama pemedas dengan pihak luar negeri maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Pemda bisa melaksanakan kerja sama internasional tidak bisa dilihat sebagai layaknya subjek hukum internasional yang lain seperti negara. Akan tetapi lebih kepada perpanjangan akan kekuasaan suatu negara bermula dari pemerintah pusat yang dijalankan oleh pemda. Pada hukum internasional pertanggung jawaban suatu perjanjian internasional tidak berada di daerah namun pada pemerintah pusat dalam mewakili suatu negara yang berdaulat. Kewenangan Pemerintah daerah untuk melaksanakan kerja sama luar negeri yang berdasarkan pada MoU yang mengatur pada UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Jadi MoU adalah salah satu bentuk perjanjian internasional yang mengaplikasikan keinginan kedua belah pihak atau lebih untuk menciptakan kewajiban hukum baru yang dapat mengikat dan mengatur hukum internasional, oleh karena itu untuk membantu tunduk dalam ketentuan hukum internasional. Pada hasilnya hal ini dilakukan oleh Pemda Jabar dan DIY dengan tiga model perjanjian internasional yang direncanakan yaitu:

1. Perjanjian kerja sama antara pemda Jabar dan DIY pada pemerintah daerah luar negeri yang berupa kerja sama sister city / province.
2. Kerja sama pemerintah daerah dengan swasta asing yang meliputi sosial, ekonomi, budaya, infrastruktur tenaga kerja dan teknologi, dan pariwisata.
3. Kerja sama pemda dengan lembaga swadaya masyarakat luar negeri dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan aparatur pemerintah.

Kerja sama Internasional yang dilaksanakan Pemerintah daerah tidak bertentangan dengan konstruksi Indonesia. Jadi, kapasitas daerah pada hal kerja sama tersebut yang sifatnya merupakan agen dari negara sebagai subjek hukum internasional. Ini dibuktikan dengan adanya full powers dari Departemen luar negeri yang dapat melakukan kerja sama internasional untuk meningkatkan kualitas dan kepentingan nasional negara.

Literatur yang ketiga adalah journal UGM oleh Agustinu Supriyanto dan Andi andi ATT yang berjudul 'Pengembangan potensi propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui kerja sama sister province'. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan potensi apapun yang dimiliki daerah yang memenuhi unsur *sistership*, *similarities*, dan kesedrajan dengan daerah di luar negeri dapat dikerjasamakan dalam hubungan *sister province*, berjalan tidaknya kerja sama sister province menyangkut paling tidak empat hal yaitu *contact person* professional, posisi masing-masing pihak konsisten, kelembagaan, yang di bentuk dan diatur secara proposional, dan dana mencukupi akan mengakibatkan kerja sama ini berjalan lancar jika sebaliknya akan mengakibatkan kerja sama tersebut tidak dapat dijalankan, yang terakhir dalam rangka mengoptimalkan kerja sama sister province Deplu sudah bersikap lebih proaktif dalam mengimplementasikan UUPI sedangkan pihak provinsi khususnya DIY kurang proaktif untuk mengimplementasikan UUPI.

Literatur yang keempat adalah dari Khoera Dara Fazra (UMY, 2015). Hasil dari penelitiannya yaitu mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerja sama Internasional yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bogor dan Kota Nanning dalam melakukan kerja sama banyak dilaksaaka dan diambil alih oleh pemerintah daerah, dan pemeritah pusat tidak banyak mengambil wewenang dalam kerja sama Sister City kedua kota.

Literatur kelima yaitu Albert (Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2011). Hasil penelitian Albert menyatakan faktor-faktor yang menunjang keberhasilan dari Sister City Semarang - Brisbane, ada 6 faktor yaitu : (1) faktor kompetensi SDM, (2) faktor funding sebaiknya ditanggung oleh kedua belah pihak dan dikelola oleh lembaga keuangan terkait, (3) faktor infrastruktur yang berperan adalah komunikasi dan jalan raya, (4) faktor kelembagaan pemerintah, dimana pemerintah merupakan titik keberhasilan terbesar dalam Sister City (5) faktor masyarakat harus aktif dalam sister city, dari semua pihak dan juga aktor pemerintahan dan (6) faktor negara mitra.

Kelima literatur review diatas memberikan masukan dan pandangan kepada penulis sekaligus memberikan wawasan kepada penulis untuk mencoba menemukan hal-hal yang baru dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Seperti yang sudah di singgung sebelumnya bahwa penelitian ini terfokus pada penganalisisan implementasi dan evaluasi kerja sama sister city DIY dengan Perfektur Kyoto.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Sister City

Sister City ataupun kota kembar merupakan konsep dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dalam tujuan menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antar penduduk, individu dan kelompok. Kota kembar pada umumnya memiliki kesamaan keadaan demografi dan masalah-masalah yang dihadapi.

Awalnya tujuan utama kerja sama antara kota dari negara yang berbeda dalam menjalankan hubungan antara masyarakat kota di suatu negara dengan masyarakat kota lain di

suatu negara sebagai *people to people diplomacy*. Pada hal ini kerja sama ini juga akan dapat menjadi hal baru dalam mencari promosi dan pasar investasi di samping untuk membantu mengoptimalkan potensi yang ada. Kerja sama *sister province* atau kota kembar juga merupakan hubungan kerja sama antara kota di suatu negara dengan kota lain di suatu negara .

Di Eropa sendiri kerja sama ini disebut dengan *Friendship Towns*, *twin towns* dan di Jerman disebut *Partner Towns*, di Amerika Utara, Asia dan Australia disebut *Sister City* dan pada negara-negara bekas Soviet disebut *Brother cities*. Kerja sama internasional *sister city* ini ditujukan untuk membangun kerja sama menyeluruh pada tingkat kota dalam memajukan kebudayaan, serta mendorong perkembangan ekonomi.

Menurut Sidik Jatmika dalam buku *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional* memberikan pengertian tentang hubungan kerja sama *sister city*, yakni hubungan kerja sama kota kembar yang dilaksanakan antar pemerintah kabupaten, kota dan administratif dengan Pemerintah Kota setingkat di luar negeri. Pada hubungan kerja sama yang dimaksud haruslah dilengkapi dengan program serta kegiatan yang tetap dan terencana, baik mengenai bidang-bidang yang ingin dikerjasamakan, dengan tujuan yang ingin dicapai dengan kontribusi biaya masing-masing pihak serta lamanya waktu yang di perlukan bagi program dan kegiatan yang dikerjasamakan.⁷

Pada dasarnya, baik Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Tingkat II dapat mengajukan hubungan kerjasama luar negeri yang bermanfaat guna menunjang program pembangunan dan membantu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sejauh tidak merugikan

⁷ Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*.hal 108

ketertiban dan keamanan umum, stabilitas politik dalam negeri, dan tetap terpeliharanya kepribadian nasional.

Lebih lanjut hubungan kerja sama sister city hanya merupakan kegiatan insidensial yang berhubungan dengan surat-menyurat, tukar-menukar informasi, saling kunjung dalam misi kebudayaan / kesenian, mempromosikan pariwisata dan kunjungan persahabatan antara kedua belah pihak Pemerintah daerah / kota yang pada perkembangannya lebih mengarah kepada bidang-bidang ekonomi dan perdagangan.

Dari sekian banyaknya model kerja sama yang dapat dijalin oleh Pemerintah daerah . Sister city menjadi sebuah alternatif kerja sama yang sering kali dipakai untuk mengembangkan persahabatan antar kota-kota/ antar pemerintah daerah, menciptakan peluang bagi warga kota untuk mengambil pengalaman dan menjajaki kebudayaan lainnya melalui proyek jangka panjang yang ada, menciptakan suasana dimana hubungan ekonomi dan jalinan perdagangan dapat di kembangkan atau di implementasikan dan diperkuat, serta dapat mendorong lingkungan di mana mitra masyarakatnya dapat belajar lebih kreatif, bekerja, memecahkan persoalan bersama. Pembentukan sister city ini dapat mencakup berbagai bidang atau subjek kerjasama dalam satu hubungan kerjasama. Sehingga kota dapat meraih pembangunan berkala meskipun dengan satu partner kota saja.

Kerja sama sister city lebih menekankan kepada kesamaan kondisional kota, yang mana kesamaan-kesamaan tersebut menjadi faktor yang paling utama dalam mengadakan kerja sama kota kembar. Mengingat kerja sama yang mengarah kepada kota kembar maka segala aspek yang selaras menjadi pengikat bagi kedua belah pihak dalam mengembangkan kerjasama tersebut.

Adapun bidang-bidang yang boleh dijadikan subjek kerja sama antara daerah / kota pada kerjasamanya sebagai kerja sama sister city, dan bidang-bidang tersebut antara lain;

- a. Kerja sama ekonomi pada bidang investasi, perdagangan, ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, kehutanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup pertambangan dan kependudukan, pertanian, pariwisata dan perhubungan.
- b. Kerja sama social dan budaya dalam bidang kesehatan, kepemudaan, pendidikan, olahraga, kewanitaan, dan kesenian.
- c. Dan Bentuk-bentuk kerja sama lainnya.

Sebagai kota yang berlainan negara, tentu saja memiliki berbagai perbedaan dari segi ekonomi, adat bahkan secara geografisnya dapat dikatakan hampir tidak mungkin dipadukan. Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa hal yang apabila diteliti lebih lanjut memiliki pokok-pokok persamaan yang hampir semua daerah memilikinya. Hal ini disesuaikan dengan pemendagri dalam surat edaran mendagri No.193/1652/PUOD tertanggal 26 april 1993, tentang terbentuk hubungan kerja sama sister province dan sister city yang harus berdasarkan pada beberapa kriteria berikut pertama adanya kesamaan status dan kedudukan administratif kota, kesamaan fungsi dan besaran, kesamaan mengenal permasalahan, ilmu, karakteristik dan teknologi yang dapat dialihkan, dan kesanggupan kedua belah pihak yang bersangkutan dalam bidang ekonomi sehingga aliran barang antara kedua belah pihak lancar.

Dari keenam kriteria di atas yang menjadi faktor yang mempengaruhi kota Yogyakarta yang kemudian menjadi pendorong untuk terciptanya hubungan kerja sama sister city dengan

Kyoto adalah adanya kesamaan dari segi kedudukan dan status sebagai kota, adanya kesamaan daerah yang mengacu pada kebudayaan asli daerah, dan kesamaan permasalahan kedua kota.

Beberapa pokok bidang yang bersama-sama di sepakati dan akan dilaksanakan bersama untuk mengisi kerja sama sister city ini adalah terdiri dari beberapa bidang seperti⁸ ;

1. Bidang kebudayaan. Meningkatnya kemampuan pengelolaan konservasi cagar budaya di provinsi DIY, melalui pengiriman petugas untuk belajar konservasi, melalui kegiatan lomba dan pameran pertukaran lukisan anak DIY Kyoto dan Jogja-Japan week yang diselenggarakan tiap tahun.
2. Bidang pendidikan. Pembentukan *Kyoto Book Center* yang sebagian besar buku dalam bahasa Jepang yang merupakan hibah dari Kyoto, pertukaran mahasiswa dengan pemberian beasiswa melalui program pemberian beasiswa pemerintah Kyoto salah satunya Ritsumeikan University.
3. Bidang pariwisata. Melalui penerimaan dua orang ekspert pada tahun 2003 yang memberikan pelatihan bagi praktis pariwisata serta meningkatnya turis asing dari Jepang khususnya dari Kyoto.
4. Dan bidang investasi. Mampu menjembatani hubungan antar pelaku bisnis di kedua belah pihak, terbukti dengan investasi yang diperoleh masyarakat kulon progo terkait dengan pembudidayaan tanaman indigo.

Selanjutnya kerja sama ini juga akan dijadikan motivasi untuk mencari promosi dan pasar investasi dalam mengoptimalkan potensi yang sudah ada. Kerja sama sister city disini berarti hubungan keaja sama antar kota di suatu negara dengan kota lain di suatu negara. Konsep Sister

⁸ Bunga Rampai Kerjasama Luar Negeri Provinsi DIY, Biro Kerjasama, Setda Prov.DIY, 2006

City inilah yang digunakan Yogyakarta untuk membuka kerja sama dengan kota-kota dari negara lain khususnya Kyoto guna terciptanya peluang dan keuntungan yang didapat dari kerja sama Sister City.

2. Teori atau konsep kerja sama internasional

Di dalam penelitiannya penulis ingin menggunakan teori kerja sama internasional ini, dikarenakan dalam tatanan hubungan internasional seperti saat ini, tidak adanya satu negara yang dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhannya atau kepentingannya tanpa menjalin kerja sama dengan pihak lain. Kerja sama perlu dilakukan sebab adanya saling ketergantungan antar negara akibat dari semakin kompleks dan dinamisnya kebutuhan masyarakat yang tidak melulu dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Koesnadi Kartasasmita bahwa kerja sama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.⁹

Mengenai kerjasama internasional, terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh K.J. Holsti, salah satunya adalah pandangan bahwa dua ataupun lebih nilai, tujuan, kepentingan saling bertemu dan akan menghasilkan sesuatu sehingga dapat dipenuhi atau dipromosikan oleh semua pihak sekaligus.¹⁰ Dengan kata lain kerja sama internasional diartikan sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih (negara atau aktor

⁹ Kartasasmita, koesnadi, 'Administrasi Internasional' 1977, hlm. 19, dalam Zulkifli. 2007. *Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia)*. Tesis diterbitkan. Jakarta: Universitas Indoneisa, diakses dari [lib.ui.ac.id/file?file=digital/20305674...%20Kerjasama%20inter na sional.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20305674...%20Kerjasama%20inter%20nasiona%20l.pdf),

¹⁰ Holsti K.J, 'Politik Internasional', Terjemaham Azhari, M.Tahrir, Erlangga, jakart, hlm. 652-653, 1988.

internasional lainnya) dengan tujuan untuk mencapai kemajuan bersama serta meraih kepentingan yang hendak dicapai.

Di dalam hubungan internasional yang bersifat transnasional seperti saat ini, aktor sub state/pemerintah regional (pemerintah daerah) juga turut serta untuk melakukan kerja sama internasional. Tuntutan zaman mendesak daerah untuk dapat lebih aktif melaksanakan berbagai kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional, dimana diharapkan dari kerja sama tersebut dapat membantu daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan atau kepentingannya.

Adapun tujuan dilakukannya kerja sama internasional adalah demi mencapai kemajuan bersama dimana seluruh manfaat dari kerja sama tersebut akan dapat dirasakan oleh semua kalangan anggota masyarakat. Salah satu manfaat diantara kerja sama internasional ini yaitu: a. *Promoting tolerance and increasing understanding* dan b. *Promoting stronger community partnership*.

Dalam pembahasan kali ini mengenai kepentingan DIY ini, bahwa pada kerja sama sister city yang dilaksanakan oleh Provinsi DIY dengan Prefektur Kyoto adalah pada '*promoting stronger community partnership*' dimana memiliki pengertian bahwa adanya manfaat kerja sama secara umum akan meningkatkan hubungan bilateral kedua belah pihak antar DIY dengan Prefektur Kyoto. Kerja sama sister city antar DIY prefektur Kyoto bukan merupakan sebuah kerja sama yang berlaku bagi pihak pemerintahan saja, tetapi juga berlaku bagi semua warga masyarakat dikedua belah pihak kerja sama. Dijalannya kerja sama ini juga maka diharapkan dapat meningkatkan mutual understanding atau sikap toleransi antar DIY dan Prefektur Kyoto.

Sehingga dimasa mendatang dapat terbina kemitraan yang baik antara DIY dengan Kyoto yang semakin kuat. Dengan melihat bahwa kerja sama ini kemungkinan akan berlangsung tanpa ada batas waktu. Saat terjadi Gempa Bumi di provinsi DIY tahun 2006 silam, negara yang paling cepat dalam hal memberikan bantuan adalah Jepang, khususnya dari pemerintah prefektur Kyoto itu sendiri.

Teori kerja sama internasional pada hal ini merupakan upaya yang digunakan dalam mengungkap sejauh mana kerja sama ini dapat meningkatkan hubungan bilateral antar DIY dengan Prefektur Kyoto. Sesuai dengan teori kerja sama internasional, ada dua kepentingan atau lebih yaitu adanya saling temu dan mampu menghasilkan sesuatu, ataupun dipenuhi dan dipromosikan oleh semua pihak sekaligus. Dalam hal ini antara DIY dengan Prefektur Kyoto sama-sama memiliki kepentingan tertentu yang kemudian kepentingan tersebut dipertemukan atau dibahas dan menghasilkan sebuah kesepakatan kerja sama internasional dalam bentuk sister city diantara keduanya. Dalam hal ini kepentingan DIY adalah demi meningkatkannya kualitas SDM di wilayahnya serta mengembangkan perekonomian daerah, sedangkan kepentingan Kyoto tidak dibahas atau dipaparkan mengingat rumusan masalah yang hanya memusatkan pada pembahasan mengenai kepentingan yang dimiliki oleh DIY.

F. Hipotesis

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi dari program sister city antara DIY dengan Prefektur Kyoto dilaksanakan dengan berupa bantuan teknis yang berwujud pengembangan dan promosi pariwisata, pertukaran pelajar, jembatan pelaku bisnis dan bantuan hibah yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY.

Evaluasi dari program sister city antara DIY dengan Prefektur Kyoto dilihat dari besarnya anggaran kerja sama ini dapat memberi keuntungan bagi Provinsi DIY dikarenakan manfaat dan hasil program yang telah terlaksana sampai saat ini.

G. Rentang Research

Lingkup penelitian dimulai pada 2015-2016 pada peristiwa perpanjangan dengan penandatanganan kembali kerja sama DIY dengan Prefektur Kyoto, akan tetapi tidak menutup kemungkinan peneliti mengambil data dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk menghindari penjelasan yang lebih luas (di luar konteks), analisis akan fokus pada data bukti yang ada untuk memperkuat penulis argumen.

H. Metode Pengumpulan Data

1) Jenis Research.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta dari sister city kerjasama Yogyakarta - Kyoto dengan menekankan pada kebijakan yang diambil dan kendala yang dihadapi.

2) Penelitian perpustakaan.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka. Ini berarti penulis mengumpulkan data dari literatur dengan masalah dan data akan dibahas yang diikuti dengan menganalisis. Literatur termasuk buku, dokumen, jurnal, koran, internet (situs), arsip dan informasinya yang mendukung sister city kerja sama DIY dengan Prefektur Kyoto.

3) Wawancara.

Wawancara merupakan cara pengumpulan informasi dan data dengan memberikan pertanyaan dan dijawab oleh responden. Dalam hal ini adalah sub bagian Biro Kerjasama dan Penanaman

Modal BKPM Setda DIY, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, DPPKA dan pihak lain yang berkepentingan dengan objek penelitian.

I. Sistem Penulisan.

Bab I adalah Pendahuluan. Bab ini berisi: latar belakang, pertanyaan penelitian, kerangka teori, hipotesis, berbagai penelitian, metode pengumpulan data dan sistem penulisan.

Bab II adalah Menjelaskan profil yang umumnya mencakup geografi dan demografi yang menjadi ciri dari kedua kota antara DIY dengan Prefektur Kyoto.

Bab III adalah Implementasi Program Sister City DIY dengan Prefektur Kyoto. Bab ini menjelaskan implementasi proses kerja sama yang berisi; nota kesepahaman dan kegiatan sister city yang dilakukan oleh kedua kota.

Bab IV adalah Evaluasi Kerja sama Sister Province DIY dengan Prefektur Kyoto. Bab ini berisi deskripsi manfaat hasil dari kerja sama Sister Province DIY dengan Prefektur Kyoto yang didalamnya juga akan diuraikan cost and benefit bagi masyarakat DIY.

Bab V adalah Kesimpulan. Bab ini berisi penjelasan singkat dari diskusi tentang masalah yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya.